



HARYADI/PONTIANAKPOST

PELAYANAN KOSONG: Sejumlah tenaga medis melakukan aktivitasnya di ruang Pelayanan Cuci Darah di Rumah Sakit Umum Soedarso.

Pelayanan Terhenti Karena Anggaran Habis

PONTIANAK - Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Soedarso Pontianak, Gede Sandjaja mengatakan menyatakan terhentinya pelayanan cuci darah, Senin (25/8) karena persoalan anggaran. Tetapi persoalan ini telah mendapatkan solusi dan pelayanan tersebut segera diberikan kembali.

"Sudah ada solusinya. Secepatnya pelayanan (cuci darah) dibuka kembali," ujar Gede di DPRD Provinsi Kalbar, Senin (25/8).

Gede menjelaskan anggaran untuk peralatan pelayanan cuci darah yang habis. Habisnya anggaran ini bukan karena perencanaan yang tidak benar, melainkan pasien cuci darah melebihi kuota anggaran yang ada. Banyaknya pasien cuci darah di Soedarso karena adanya Jaminan Kesehatan Nasional BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

◆ Ke Halaman 15 kolom 1

Pelayanan Terhenti Karena Anggaran Habis

Sambungan dari halaman 9

Dengan diberlakukannya BPJS, rumah sakit swasta yang sebelumnya melayani pasien jamkesmas dan BPJS kini tak melayani.

"Akhirnya pasien ke Soedarso," katanya.

Saat anggaran cuci darah habis, lanjut Gede, ia pun berusaha melobi perusahaan pemasok peralatan cuci darah agar RSUD Soedarso diperbolehkan berutang dulu. Pembayaran dilakukan saat dana APBD Perubahan cair. Diperkirakan anggaran tersebut cair pada Oktober mendatang. Tetapi ketika itu, perusahaan belum mau memberi utang.

"Tadi (kemarin) pagi, saya

katakan kepada staf saya, utang dulu seminggu dengan garansi pribadi saya. Ini saya lakukan demi pasien. Tetapi Tuhan YME tahu yang benar. Akhirnya perusahaan pemasok (peralatan cuci darah) boleh kami utang dulu sampai anggaran belanja tambahan cair," jelasnya.

Ia menambahkan kejadian serupa pernah terjadi sekitar tiga tahun lalu. Ketika itu ia merasa kasihan dengan pasien, sehingga memutuskan membeli peralatan dengan menggunakan tanggungan pribadi. Sebulan kemudian, anggaran belum cair sehingga ia terpaksa membayar dari kocek pribadi sebesar Rp125 juta. Kemudian BPK RI

melakukan pemeriksaan dan ternyata tindakannya tersebut dilarang.

Gede memastikan selama ini RSUD Soedarso bekerja dan menggunakan anggaran sesuai aturan dan undang-undang berlaku. Apalagi saat ini Pemprov Kalbar telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI terhadap laporan keuangannya.

"Satu orang cuci darah, jika sudah parah bisa tiga kali seminggu. Satu kali biayanya hampir Rp1 juta. Bayangkan kalau tidak ditanggung BPJS. Jadi buruk-buruk Soedarso, orang masih sayang dengan Soedarso," ungkapnya.

Wakil Gubernur Kalbar,

Christiandy Sanjaya mengatakan Direktur RSUD Soedarso telah melaporkan persoalan habisnya anggaran cuci darah tersebut. "Sudah diajukan tambahannya dalam APBD Perubahan," ujar Christiandy di DPRD Provinsi Kalbar.

Menurut Christiandy, kesulitan ini terjadi karena APBD Perubahan tak dapat digunakan sebelum disahkan. Tetapi di sisi lain, pasien tidak bisa menunggu hingga pengesahannya. Beruntung persoalan ini dapat diatasi. "Jika menunggu APBD Perubahan diketok, pasien bisa meninggal (dulu). Kedepannya akan dipikirkan agar anggarannya lebih besar," kata Christiandy. (uni)